

RINGKASAN

Pernikahan dini di Indonesia sangat marak terjadi sehingga menjadikan Indonesia berada di urutan kedua di ASEAN dengan angka pernikahan dini tertinggi. Praktik pernikahan dini, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Banteran menjadi keprihatinan banyak pihak. Berdasarkan temuan di lapangan menurut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang, Desa Banteran menjadi Desa dengan angka pernikahan dini tertinggi yaitu 7 pasangan yang melakukan dispenasai pernikahan pada tahun 2024. Penelitian ini penting karena fenomena pernikahan dini menimbulkan beragam permasalahan, karena ketidaksiapan individu berdampak langsung pada keharmonisan dan penerapan fungsi keluarga.

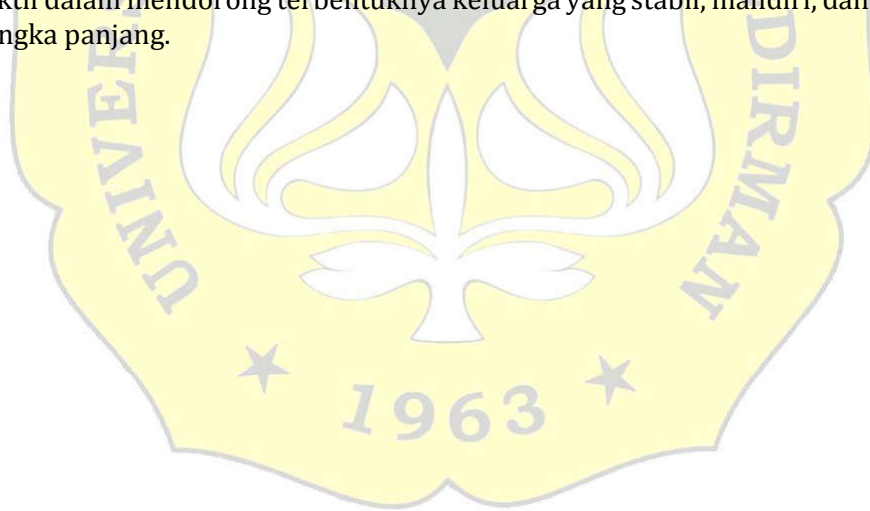
Penelitian ini berfokus pada tantangan dan upaya pasangan pernikahan dini dalam menjalankan fungsi keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja motif terjadinya pernikahan dini dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana upaya yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam menjalankan fungsi keluarga. Penelitian ini menggunakan teori aksi oleh Talcott Parsons, yang memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan utama dipilih secara purposive, terdiri dari lima pasangan pernikahan dini yang telah menikah lebih dari dua tahun dan telah memiliki anak yang bertempat tinggal di Desa Banteran, dikarenakan dua pasangan lainnya telah pindah domisili dan tidak lagi tinggal di Desa Banteran sehingga tidak memenuhi kriteria lokasi penelitian. Informan pendukung terdiri atas kader PPKBD Desa Banteran dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Sumbang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif utama terjadinya pernikahan dini adalah keputusan atau dorongan kuat dari orang tua, karena takut pandangan negatif masyarakat atau untuk menghindari aib sosial. Sebagian lainnya menikah karena merasa diri sudah siap. Setelah menikah, pasangan menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta kesulitan mengasuh anak di usia yang masih sangat muda. Meski demikian, mereka tetap berupaya menjalankan fungsi keluarga dengan berbagi peran ekonomi walau sederhana, mengasuh dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang meski komunikasi terbatas, serta mengajarkan sopan santun dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Pembagian peran dalam keluarga pasangan pernikahan dini pun menunjukkan pola yang beragam. 60% pasangan pernikahan dini masih mengikuti pola tradisional berbasis gender atau patriarki, di mana suami bertugas sebagai pencari nafkah (pekerjaan publik) dan istri mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik), sedangkan 20% lainnya mulai menerapkan pola kerjasama, dengan berbagi peran mencari nafkah dan juga pekerjaan

rumah tangga seperti membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain sebagainya. Selain itu, 20% lainnya mengandalkan dukungan keluarga luas, terutama orang tua, dalam menjalankan fungsi rumah tangga terutama dalam pengasuhan anak. Temuan ini mencerminkan bahwa struktur dan pembagian peran dalam keluarga pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti patriarki, kondisi ekonomi, serta dukungan sosial dari lingkungan keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pasangan pernikahan dini di Desa Banteran penting untuk mendapatkan pendampingan dan edukasi pasca nikah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Pendampingan tersebut penting untuk membekali pasangan muda dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, manajemen keuangan keluarga, serta komunikasi dalam rumah tangga. Edukasi pasca nikah juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik, memperkuat keharmonisan, dan membantu pasangan dalam menavigasi tantangan fungsi keluarga yang mereka hadapi. Temuan ini memberikan landasan penting bagi pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merancang program pemberdayaan keluarga yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Program tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan pranikah dan pascanikah, penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB), serta penguatan peran kader seperti PPKBD dan PLKB sebagai pendamping yang dekat dengan pasangan pernikahan dini. Adanya pendekatan berbasis kebutuhan nyata pasangan muda, kebijakan di tingkat desa dapat lebih efektif dalam mendorong terbentuknya keluarga yang stabil, mandiri, dan harmonis dalam jangka panjang.



SUMMARY

Early marriage is so prevalent in Indonesia that it ranks second in ASEAN with the highest rate of early marriage. The practice of early marriage, particularly in rural areas like Banteran Village, is a growing concern. According to field findings from the Sumbang District Religious Affairs Office (KUA), Banteran Village has the highest rate of early marriage, with seven couples seeking marriage dispensations by 2024. This research is important because the phenomenon of early marriage creates various problems, as individual unpreparedness directly impacts harmony and the implementation of family functions.

This research focuses on the challenges and efforts of early-married couples in carrying out family functions. The purpose of this study is to determine the motives for early marriage, the challenges faced, and the efforts made by early-married couples in carrying out family functions. This research utilizes Talcott Parsons' theory of action, which views social action as something intentionally created by individuals within a context that has been given meaning. The method used is qualitative. The primary informants were purposively selected, consisting of five early marriage couples who had been married for more than two years and had children living in Banteran Village. Two other couples had moved and no longer lived in Banteran Village and therefore did not meet the research location criteria. Supporting informants included Banteran Village PPKBD cadres and Sumbang District Family Planning Field Officers (PLKB). Research data were collected through in-depth interviews with these informants, field observations, and documentation.

The results of this study indicate that the primary motive for early marriage is a strong decision or encouragement from parents, fearing negative public perception or avoiding social disgrace. Others married because they felt ready. After marriage, couples face major challenges such as economic constraints, low education, and the difficulty of raising children at such a young age. Nevertheless, they continue to fulfill family functions by sharing economic responsibilities, albeit modestly, caring for and raising their children, providing affection despite limited communication, and teaching good manners within the household and community.

The division of roles within the families of early marriage couples also shows diverse patterns. Sixty percent of early marriage couples still follow traditional gender-based patterns, or patriarchy, where the husband is the breadwinner (public employment) and the wife takes care of the household (domestic work). Another 20% have begun to implement cooperative patterns, sharing the role of breadwinner and household chores such as cleaning, childcare, and so on. Furthermore, another 20% rely on the support of their extended family, especially their parents, to carry out household functions, particularly childcare. These findings reflect that the structure and division of roles in